

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi sektor publik merupakan suatu entitas yang kegiatannya menyediakan barang dan jasa untuk publik. Tujuan organisasi sektor publik berbeda dengan organisasi sektor swasta, dari sudut pandang ekonomi organisasi sektor publik adalah organisasi yang aktivitasnya berupa menghasilkan barang dan pelayanan publik dalam rangka memenuhi hak publik (Ulum, 2004). Organisasi sektor publik identik dengan organisasi pemerintah atau badan usaha yang mayoritasnya dimiliki oleh pemerintah untuk melakukan pelayanan publik demi memenuhi kebutuhan di berbagai sektor/bidang kehidupan seperti kesehatan, pendidikan, transportasi, keamanan, perekonomian dan beberapa hal lainnya.

Di Indonesia, organisasi atau badan usaha milik pemerintah dalam praktiknya dituntut untuk melakukan akuntabilitas dalam melakukan aktivitasnya, baik pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Akuntabilitas adalah kewajiban mempertanggungjawabkan kesuksesan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam memenuhi sasaran dan tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik (Mardiasmo, 2006).

Dalam mewujudkan akuntabilitas dan transparansi, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyusun laporan pertanggungjawaban yang berbentuk laporan keuangan. setelah itu, laporan keuangan tersebut diserahkan kepada DPR/DPRD

serta masyarakat setelah sebelumnya diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 01 yang diadopsi dari Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan harus disusun mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu, pengelolaan keuangan pemerintah daerah dilakukan atas dasar tata kelola pemerintahan yang baik adalah pengelolaan keuangan yang dilakukan secara akuntabel dan transparan sehingga para pengguna laporan keuangan dapat mengakses hasil dan pencapaian pemerintah daerah.

Faktor yang berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah kompetensi sumber daya manusia (SDM) di bidang akuntansi. SDM yang memiliki kompetensi akan dapat meningkatkan kinerja para penyelenggara pemerintah khususnya kepada para pengelola keuangan. Sehingga akan berpengaruh kepada keandalan laporan keuangan pemerintah daerah karena laporan keuangan adalah sebuah produk yang dihasilkan oleh bidang atau disiplin ilmu akuntansi.

Hal yang mendasar dari penerapan akuntansi di dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) salah satunya adalah sistem akuntansi. Menurut kepmendagri No.29 Tahun 2002 pasal 70 ayat (1) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah:

“sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan ,penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berterima umum.”

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah dengan harapan diterapkannya sistem tersebut dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 pada Tahun 2005 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 pada Tahun 2010 menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkewajiban untuk memanfaatkan dan mengembangkan sistem informasi sehingga dapat menciptakan dan meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan memberikan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik. Sehingga perlu adanya optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi demi mendukung pembangunan jaringan sistem informasi yang baik.

Pengendalian intern diperlukan dalam sebuah entitas termasuk entitas dipemerintah daerah karena kegiatan operasional dan kinerja membutuhkan suatu kebijakan khusus yang dapat mengakomodasi dan memberikan batasan serta ketentuan khusus dalam setiap pelaksanaan kegiatannya. Pengendalian intern dibutuhkan agar mudah dalam menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada atau permasalahan yang mungkin akan timbul dalam proses pencapaian tujuan sehingga pencapaian tujuan bisa diketahui secara jelas.

Adanya laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan dan dipahami berkaitan dengan posisi keuangan serta seluruh data transaksi yang dicatat oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Begitu pula dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) dimana setiap tahunnya dinilai oleh auditor pemerintahan yaitu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan memberikan sebuah opini. Opini yang diberikan BPK terbagi menjadi empat, yaitu : Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar (TP), dan Tidak Memberi Pendapat (TMP). Jika sebuah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) memperoleh Opini WTP, maka dapat dikatakan laporan keuangan telah disajikan dan diungkapkan secara berkualitas dan wajar.

Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Nurillah dan Muid (2014) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2018) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi staf terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Sumber

Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah, namun Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, dan Kompetensi staf tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Ada pula penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rini (2017) yang berjudul, “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah”. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukannya, dinyatakan bahwa Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Triyanti (2018) yang berjudul, “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang,” bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Alamsyah, dkk (2018) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah,” menunjukkan bahwa variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan

Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Nugraheta (2017) yang berjudul ” Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” menunjukkan variabel Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Selain itu, menurut penelitian Mokoginta, dkk (2017) yang berjudul “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” menunjukkan variabel Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah namun Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Berdasarkan teori dan ketidakkonsistenan pada penelitian terdahulu dimana penelitian yang dilakukan oleh Nurillah dan Muid (2014), Triyanti (2018), Rini (2017), dan Alamsyah, dkk (2018) menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah, sistem pengendalian intern, kompetensi sumber daya manusia, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan Nugraheta

(2017) menunjukkan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, Mokoginta, dkk (2017) menunjukkan sistem pengendalian intern berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan penelitian yang dilakukan oleh Ramadhani (2018) menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka peneliti ingin meneliti kembali penelitian ini dengan objek yang berbeda yaitu Organisasi Pemerintah Daerah Kota Palangkaraya. Peneliti memilih objek penelitian tersebut karena LKPD Kota Palangkaraya memperoleh opini WTP selama 3 tahun berturut-turut di tahun 2016, 2017, 2018 setelah dua tahun sebelumnya berpredikat WDP. Namun menurut Ketua Perwakilan BPK RI Kalimantan Tengah, Ade Iwan Ruswana pada LKPD Kota Palangkaraya masih terdapat temuan berupa kelebihan pembayaran ataupun kekurangan penerimaan, adanya pengelolaan dan pencatatan aset, baik itu aset tetap, sudah rusak berat atau yang sudah dihibahkan tapi belum dihapus yang apabila tidak ditindak lanjuti, sangat berpotensi mempengaruhi opini di masa mendatang. (www.antarane.ws.com)

Berdasarkan teori di atas dan didukung dengan fakta yang ada, peneliti ingin meneliti lebih lanjut mengenai **“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palangkaraya”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Palangkaraya?
2. Apakah Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Palangkaraya?
3. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Daerah Kota Palangkaraya?
4. Apakah Sistem Pengendalian Intern berpengaruh terhadap kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palangkaraya?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kembali pengaruh antara variabel independen (Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern) terhadap variabel dependen (kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah) Kota Palangkaraya. Penelitian ini dilakukan di Kota Palangkaraya karena menurut ketua perwakilan BPK RI Kalimantan Tengah, Ade Iwan Ruswana masih ditemukan temuan-temuan yang berpotensi mempengaruhi kualitas LKPD Kota Palangkaraya di masa mendatang apabila tidak ditindak lanjuti.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kontribusi Teori

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan masukan bagi pihak-pihak yang akan melakukan penelitian serupa yaitu Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi, dan Sistem Pengendalian Intern Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

2. Kontribusi Praktek

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi bagi Pemerintah Kota Palangkaraya dalam upaya penyempurnaan kebijakan-kebijakan guna meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.